

Research article

Dinamika Budaya Politik Kiai: Studi pada Politik Kiai Kampung di Tuban, Indonesia

The Dynamics of Kiai Political Culture: Study on Kiai Kampung Politics in Tuban, Indonesia

Mutamakin¹ & Zen Amrullah^{2*}

¹² STAI Ma'had Aly Al-Hikam, Malang, Indonesia

* zenamrullah@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the political attitudes of kiai (muslim traditional leader) in Tuban Regency of East Java province, Indonesia, in particular of the reasons why they still maintain the paternalistic tradition and its impact on the teaching tradition in pesantren, as well as their views and roles in the political arena. Using a qualitative research approach, this case study collected data through observation and interviews. Along with the changes and dynamics that occur in society, kiai in the region have various responses on the ongoing political situation. Furthermore, their roles and attitudes can be grouped into (1) parochial kiai (apathy), (2) subject kiai (passive participants), and (3) participant kiai. This study shows that the political culture of kiai in Tuban is diverse and dynamical according to the existing situations.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap politik kiai di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, khususnya mengenai alasan mereka masih mempertahankan tradisi paternalistik dan dampaknya terhadap tradisi pengajaran di pesantren, serta pandangan dan peran mereka dalam kancah politik. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus ini mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Seiring dengan perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat, kiai di daerah tersebut memiliki berbagai respons terhadap situasi politik yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, peran dan sikap mereka dapat dikelompokkan menjadi (1) kiai parokial (apatis), (2) kiai subjek (partisipan pasif), dan (3) kiai partisipan. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya politik kiai di Tuban beragam dan dinamis sesuai dengan situasi yang ada.

Keywords

Kiai politics; local muslim leader; pesantren; politics; typologies of kiai.

Article history

Submitted: 20/10/2024; revised: 19/11/2024; accepted: 15/12/2024.

Statement

The authors declare that they have no conflict of interest.



© 2024 by the author(s). This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Posisi dan peran penting kiai (tokoh agama Islam) dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, sudah eksis sejak masa pra-kemerdekaan atau bahkan sudah mulai sejak awal mula penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Peran penting dan posisi sentral kiai yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini dapat difahami karena mereka adalah pewaris, penerus, sekaligus penjaga tradisi Islam. Peran kiai ini dalam perkembangannya semakin menguat karena didukung oleh karakter budaya asli Indonesia yang religius di mana faktor religiusitas dan spiritualitas dipandang lebih tinggi dibandingkan dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, baik sosial-ekonomi maupun politik.

Studi tentang peran penting kiai dalam masyarakat Indonesia ini telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan ilmuwan sosial. Kurasawa misalnya, melihat kiai sebagai pemimpin spiritual dan memperoleh kehormatan dari rakyat. Lebih lanjut Kurasawa menyatakan bahwa ketika zaman penjajahan Belanda banyak kiai yang berperan sebagai pemimpin gerakan anti penjajahan, sehingga keberadaan kiai ditakuti oleh Belanda (Kurasawa, 1993). Demikian juga Dirjosanyoto melihat bahwa kiai memiliki peran ganda; di satu sisi ia adalah tokoh agama, di sisi lain ia sebagai tokoh politik (Dirjosanyoto, 1999). Peran ganda ini memberinya ruang gerak yang cukup untuk melakukan berbagai variasi aktivitas baik dalam aspek keagamaan, sosial maupun politik. Studi lain tentang memanfaatkan pengaruh kiai terhadap partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pengaruh ini dimanfaatkan untuk manuver strategi PKB sebagai upaya mengamankan kemenangan dalam pemilu 2024. Studi ini juga mengkaji dampak otoritas kiai di dalam internal PKB menjelang pemilihan umum 2024. Studi tersebut menyebutkan bahwa kiai memiliki otoritas yang melampaui urusan agama, bahkan juga mencakup semua urusan aspek budaya di Indonesia (Mutiullah, 2024). Studi lain adalah penelitian yang dilakukan Muary tentang keterlibatan Tuan Guru Batak (kiai) dalam politik praktis Pilkada kota Medan pada tahun 2020. Keterlibatan Tuan Guru Batak dalam politik praktis didasari oleh keinginan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan legitimasi dari kekuasaan (Muary & Nurwahyu, 2024).

Untuk membatasi fokus pembahasan tentang peran kiai, artikel ini mencoba untuk meneropong peran kiai di pedesaan di wilayah kabupaten Tuban terutama pada saat pilkada 2024. Dilihat dari realitas kultural, masyarakat Tuban mempunyai karakteristik yang religius dan sangat menghormati kiai. Bentuk penghargaan warga masyarakat Tuban terhadap peran kiai yang tidak terbatas pada permasalahan agama saja, akan tetapi secara luas dalam kehidupan masyarakat, baik menyangkut

aspek sosial maupun politik. Dalam kultur masyarakat yang demikian ini, kiai memiliki pengaruh dan kharisma yang kuat sehingga menempatkan mereka menjadi kekuatan politik tersendiri dalam masyarakat. Kekuatan ini yang membuat kiai dan santrinya seringkali menjadi sasaran tarik menarik antar kekuatan sosial politik di Indonesia (Chilcote, 2003). Fenomena ini mencerminkan bahwa *budaya politik* kiai berpengaruh luas dalam struktur kehidupan masyarakat di Kabupaten Tuban. Kepemimpinan kiai yang kharismatik menjadikannya sebagai sosok penting dalam kehidupan sosial masyarakat. kiai sebagai figur kharismatik selanjutnya ikut berpengaruh dalam membentuk pola kehidupan sosial, kultural dan keagamaan warga masyarakat.

Dalam artikel ini penulis mencoba menjawab satu pertanyaan sentral, yaitu bagaimana sikap politik kiai di daerah Tuban? Guna memudahkan identifikasi dan sistematisasi penulis merinci ke dalam beberapa pertanyaan lebih detil: *Pertama*, Mengapa kiai pesantren masih mempertahankan tradisi pesantren yang paternalistik, dan bagaimana dampaknya terhadap tradisi pengajaran di pesantren?. *Kedua*, Bagaimana upaya yang dilakukan kiai dalam mempertahankan otoritasnya melalui pembentukan jaringan di pedesaan?. *Ketiga*, Bagaimana bentuk orientasi, pandangan dan perannya dalam arena politik sesuai dengan karakteristik masing-masing kiai?

Jawaban dari persoalan tersebut di atas, selanjutnya diharapkan akan memberikan pemahaman tentang: *Pertama*, langkah-langkah yang dilakukan kiai dalam mempertahankan tradisi pesantren yang paternalistik dan dampaknya terhadap tradisi di Pesantren; *Kedua*, langkah-langkah yang dilakukan kiai dalam mempertahankan otoritas dan kewibawaannya melalui pembentukan jaringan di pedesaan; dan *Ketiga*, orientasi, pandangan dan peran kiai dalam arena politik sesuai dengan karakteristik masing-masing kiai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Sebagai penelitian yang menggunakan studi kasus, penelitian ini dibatasi oleh ruang yang berlokasi di Tuban Jawa Timur Indonesia. Selain itu, penelitian ini dibatasi oleh waktu pilkada Tuban pada tahun 2024. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kata-kata, ucapan, tindakan dan perilaku. Untuk itu, data tersebut dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan enam tahapan sebagaimana yang ditawarkan oleh Creswell. Pengelolaan data yang telah terkumpul, membaca dan membuat konsep atas data dengan membuat catatan kecil pada masing-masing data, mendeskripsikan kasus sekaligus dengan konteksnya,

membuat katagorisasi, menafsirkan data dengan menggunakan generalisasi naturalistik, memvisualisasikan bagian data-data tertentu (Ridlo, 2023).

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Tradisi Pesantren: Interaksi, Relasi, dan Struktur

Sistem interaksi di kalangan santri berjalan melalui kontak langsung dan dilandasi prinsip persaudaraan yang terjalin kuat antara santri yang satu dengan santri lainnya. Pola hubungan di kalangan santri yang mengarah kepada persahabatan sejati ini didasarkan atas hubungan simpatik yang berarti suatu keinginan untuk mengidentifikasi kepentingan. Semakin individualis seseorang, semakin sukar baginya untuk berusaha mengidentifikasi dirinya dengan orang lain (Mannheim, 1987).

Langkah yang ditempuh untuk membentuk dan mempertahankan kebersamaan dalam komunitas pesantren antara lain melalui pembentukan tata tertib sebagai norma yang mengikat dan mengatur tata kehidupan santri di pesantren. Pemberian sanksi bagi pelanggaran bentuknya beragam, dari hukuman membersihkan lingkungan pondok dan membayar denda, bagi yang membolos dari kegiatan pesantren, digundul kepalanya ataupun dipulangkan dari pesantren. Dipulangkan (diusir) dari pesantren merupakan sanksi yang paling berat bagi santri, sanksi ini diberikan kepada santri yang seringkali melanggar tata tertib dan melakukan perbuatan kriminal seperti mencuri atau menganiaya santri lainnya. Pemberian sanksi tersebut pada dasarnya untuk mengarahkan agar santri mampu bertingkah laku sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan. Keseragaman cara berpakaian, tingkah laku terhadap kiai ataupun santri lainnya memperlihatkan adanya norma-norma yang mengaturnya. Dalam konteks ini, untuk menguji apakah keseragaman tingkah laku memang benar menggambarkan kesetiaan pada norma sosial adalah dengan melihat apakah tingkah laku yang menyimpang dari keseragaman tersebut mendapat sanksi (Beny, 2003).

Selanjutnya, ditemukan bahwa tradisi hubungan kiai-santri di daerah Tuban ada dua tipe: *pertama*, pola hubungan guru-murid, adalah hubungan yang terjalin antara kiai dan santri sebagaimana layaknya antara guru dengan murid dalam pola hubungan pendidikan formal. Pola ini berlaku di lingkungan pesantren yang telah mengadopsi sistem pendidikan modern. *Kedua*, pola hubungan bapak-anak, yaitu pola hubungan yang terjalin antara kiai dengan santrinya sebagaimana layaknya antara bapak dengan anak dalam sebuah keluarga. Dalam pandangan kiai, santri di

samping sebagai anak didiknya juga dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Tindakan ini mendorong terbentuknya pola hubungan yang terjalin antara kiai dengan santri sebagaimana layaknya hubungan antara orangtua dan anak (pola paternalistik) (Fadhilah, 2007).

Pola hubungan paternalistik yang terjalin antara kiai dengan santri di pesantren dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri kiai yang bersangkutan yang memandang santri sebagai amanat yang harus dididiknya sebagaimana anaknya sendiri. Sedangkan faktor eksternal berasal dari tradisi orang tua santri yang menyerahkan anaknya kepada kiai secara langsung dan santri yang menganggap kiai sebagaimana orangtuanya sendiri di pesantren. Di samping itu juga dipengaruhi oleh adanya doktrin dari kitab Ta'lim Muta'allim yang mengajarkan ketaatan santri kepada kiai (Az-Zarnuji, 2019). Ketaatan kepada kiai merupakan salah satu cara santri untuk menghormati kiainya. Dalam tradisi pesantren, cara ini berjalan terus dan berkembang menjadi kebiasaan yang terus dilakukan oleh santri. Kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang terus dilakukan santri sehingga berkembang menjadi pedoman dan pengatur perilaku santri sebagai suatu tata kelakuan (mores) yang berlaku di pesantren.

Dari ragam pola interaksi dan relasi tersebut, muncul juga ragam struktur kekuasaan dan pola kepemimpinan pada pesantren di Tuban sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Struktur Kekuasaan dan Pola Kepemimpinan Pesantren di Tuban

Jenis Pesantren	Organisasi	Pola Kepemimpinan	Pola Pergantian Pemimpin
Pesantren dengan sistem pendidikan formal (modern)	Otoritas organisasi	Otoritas Legal rasional	<i>Assigned status</i>
Pesantren (tradisional)	Salafiyah Otoritas Personal	Paternalistik	<i>Ascribed Status</i>

Di pesantren dengan sistem pendidikan modern, pengangkatan pemimpin pesantren dilaksanakan oleh pengurus Yayasan, sehingga keputusan di Pesantren berdasarkan hirarki otoritas legal rasional, yaitu kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi (Meyer, 1987). Demikian juga dalam sistem pergantian pengasuh (pemimpin) berdasarkan penunjukan (*assigned status*) (Polak, 1979). Di pesantren tradisional, atau salafiyah,

pola kepemimpinan yang diterapkan adalah pola paternalistik. Status kiai sebagai pendiri ataupun penerus kiai sebelumnya menempatkan kiai sebagai pemegang otoritas mutlak atas pesantrennya, kecuali dalam penentuan kurikulum pesantren. Proses pergantian kepemimpinan pengasuh (pemilik) pesantren dilaksanakan melalui sistem warisan (*ascribed status*) berdasarkan hubungan kekeluargaan. Namun di beberapa pesantren, kiai mempunyai wewenang yang penuh atas pesantrennya termasuk dalam penentuan kurikulum pesantren. Pola kepemimpinan dalam pesantren berlaku seumur hidup. Proses pergantian kepemimpinan berdasarkan sistem warisan (*ascribed status*) dengan mengacu pada hubungan garis keluarga (genealogi).

2.2. Dinamika Tradisi Pesantren dan Jaringan Kiai

Berdasarkan sistem penyelenggaraan pendidikannya, pesantren di daerah kabupaten Tuban dapat dikategorikan menjadi dua tipe: pesantren salafiyah dan pesantren kombinasi salafiyah-kholafiyah. Pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana berlangsung sejak pertumbuhannya. Metode pengajaran sistem salaf dilakukan melalui dua cara: pertama, sistem wetonan atau bandongan (pengajian bersama dipimpin oleh kiai/ustadz). Kedua, sistem sorogan, yaitu model belajar yang dilakukan dengan cara santri menghadap ustadz/kiai satu persatu untuk menyorogkan (setor bacaan dan pemahaman) kitabnya, kemudian kiai/ustadz membetulkan kesalahan dan menambah pelajaran baru, cara ini dilakukan secara bertahap dan terus menerus sampai khatam kitab.

Pesantren kombinasi salafiyah-kholafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajarannya dengan mengkombinasikan antara pendekatan tradisional dengan sistem khalaf, yaitu kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui kegiatan belajar klasikal dengan kurikulum yang terstruktur berdasarkan jenjang kelas.

Melihat kedua sistem pengajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pesantren di satu sisi telah mengalami perubahan, namun di sisi lain masih tetap mempertahankan tradisi yang sudah ada (salafiyah). Pemeliharaan sistem tradisional (salafiyah) dilakukan oleh para kiai, di antaranya, sebagai bentuk penghormatan kepada para guru/kiai sebelumnya atau karena tidak memiliki background pendidikan selain dari tradisi yang telah diwarisi dari para guru-gurunya. Sementara pesantren yang menerapkan sistem kholaf, di samping salaf, lebih

berorientasi kepada penyesuaian dengan perkembangan baru sistem pendidikan dan kebutuhan masyarakat luas.

Seiring dengan berjalannya waktu, interaksi yang dilakukan kiai dengan berbagai pihak, termasuk di antaranya adalah santri, wali santri, dan masyarakat, telah membentuk suatu jaringan sosial yang cukup kuat. Dalam perspektif sosiologi, suatu jaringan dikonsepsikan sebagai suatu tipe hubungan antar aktor dengan ditandai adanya hubungan timbal-balik yang simetris (Usman, 1991). Dalam konteks ini diasumsikan bahwa setiap hubungan antar aktor yang terjalin dalam masyarakat merupakan suatu bentuk jaringan (*the building block of network*). Karena itu, dasar hubungan sosial yang berbeda akan melahirkan jaringan yang berbeda pula. Berdasarkan hubungan sosial yang mendasarinya, tipologi kiai pesantren di Tuban dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

Pertama, jaringan ideologi, jaringan yang dibentuk karena adanya persamaan kepentingan ideologis, baik yang bersifat pemahaman keagamaan ataupun ideologi komunitas. Dalam konteks ini, antara kiai yang berbeda latar belakang, memiliki jaringan hubungan karena adanya ikatan sebagai pemeluk agama yang sama (Islam). Atau secara aliran keagamaan mereka memiliki ikatan yang sama sebagai penganut faham *ahlus sunnah wal jama'ah* (Muzadi, 1999). Dengan demikian, suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika jaringan tersebut (Maryanski, 1998). Dalam konteks ini, aktor (kiai) yang terlibat dalam jaringan tersebut akan bertindak sesuai dengan jaringan yang ada.

Kedua, jaringan genealogi, jaringan yang terbentuk melalui hubungan darah ataupun kekerabatan antara kiai yang satu dengan kiai lainnya. Tradisi yang berlaku di kalangan kiai adalah memperkuat tali silaturahmi melalui pemeliharaan dan penciptaan ikatan kekerabatan (pernikahan). Sebagai contoh, misalnya keluarga kiai pesantren As-Shomadiyah Makam Agung Tuban dijodohkan dengan keluarga dari kiai pesantren Sarang Rembang Jateng.

Ketiga, jaringan intelektual, jaringan yang terbentuk melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh kiai sebagai guru dan santri sebagai murid. Jaringan ini terbentuk melalui tradisi pesantren yang memelihara rantai transmisi intelektual yang biasa disebut dengan sanad (Dhofier, 1994). Jaringan ini menunjukkan adanya pengakuan yang kuat dari santri kepada kiai nya selaku guru yang telah mengajarnya dan memperoleh ilmu dari guru sebelumnya. Demikian seterusnya, sehingga antara pesantren yang satu dengan lainnya terbentuk jaringan penerus penyebaran ilmu agama dari guru yang sama.

Keempat, jaringan kelembagaan, jaringan yang terbentuk di kalangan kiai melalui institusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewadahi pertemuan para kiai dari berbagai organisasi sosial keagamaan. Melalui MUI, kiai pesantren membentuk jaringan kelembagaan yang menjadi media komunikasi antara kiai yang satu dengan lainnya di luar komunitasnya masing-masing. Selain itu, secara kelembagaan, jaringan kiai terbentuk melalui kepengurusan di organisasi NU. Komunikasi sering kali terbangun dengan menjalin hubungan yang struktural. Meskipun demikian, jaringan ini masih sangat kental hubungan dengan gaya kultural.

Kelima, jaringan tarekat, jaringan yang terbentuk karena adanya aktivitas spiritual keagamaan dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan (thoriqoh; tarekat). Tarekat juga mengembangkan konsep silsilah, yaitu rantai yang mengukuhkan otoritas guru. Melalui istilah itu, jalur transmisi otoritas dan barokah dibangun. Dengan cara ini kekuatan spiritual guru dapat ditransmisikan ke generasi berikutnya (Tafsir, 1991). Kiai pesantren yang menjadi murid tarekat di lingkungannya masing-masing memiliki jaringan dengan kiai lainnya di berbagai pesantren yang menganut tarekat yang sama. Salah satu tokoh tarekat Qodiriyah wa Naqsabandiyah di Kabupaten Tuban adalah K.H. Abdullah Faqih (Pesantren Langitan) yang menjadi murid tarekat setelah mendapat ijazah dari orang tuanya. Beliau juga masih keluarga dekat dengan K.H. Dimiyati (Peterongan Jombang) Mursyid Thoriqoh Qodiriyah wa Naqsabandiyah, serta memiliki sanad thoriqoh yang sama dengan K.H. Maimun Zubair (Sarang, Rembang, Jateng).

2.3. Kiai Pesantren di dalam Arena Politik

A. Tipologi dan Orientasi Aktivitas

Dalam menyikapi dan terlibat dalam politik, terdapat beberapa ragam kiai yang dapat dikategorikan atau ditipologikan sebagai berikut: *pertama*, kiai *khitah* atau kiai kitab, yaitu kiai pesantren yang berperan sebagai pendidik yang mengajarkan ilmu agama melalui kajian terhadap kitab-kitab kuning (klasik). Tipe kiai ini pada dasarnya merupakan peran yang melekat pada setiap kiai pesantren, sebab selain sebagai pengasuh, kiai pesantren juga merupakan guru yang mengajarkan kitab-kitab agama baik di dalam pesantren maupun di masyarakat. Namun dalam kaitannya dengan politik, kiai ini tidak berkenan untuk terlibat atau memberikan pendapat.

Kedua, kiai spiritual (tarekat), kiai pesantren yang berperan sebagai *mursyid* (guru) dalam suatu jama'ah tarekat. Perannya dalam hal ini sebagai pembimbing

jama'ahnya dalam mengamalkan tarekat yang diikutinya agar terfokus kepada aktifitas mensucikan hati untuk mendekati diri kepada Tuhan. *Ketiga*, kiai *hikmah*, kiai pesantren yang memiliki kemampuan supranatural dan memberikan pelayanan pertolongan kepada masyarakat untuk mendapatkan pengobatan alternatif, pemberian amalan dzikir dan wiridan, serta do'a untuk keberkahan (Humaeni, 2016). Orientasi aktifitas kiai hikmah ini lebih mengarah kepada pelayanan sosial melalui pendekatan keagamaan untuk melakukan pengobatan tradisional atas dasar agama.

Keempat, kiai advokatif, kiai pesantren yang memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta mampu berperan secara langsung dalam melakukan kontrol sosial kepada masyarakat sekitarnya. Bahkan kelompok kiai ini sering kali terjun menyelesaikan problematika masyarakat secara langsung. *Kelima*, kiai politik, yaitu kiai pesantren yang menjadi pengurus partai politik. Dalam pandangan tipe kiai politik, aktivitas politik hanya sebagai kendaraan untuk mengatur kehdupan di dunia, sedangkan urusan mengajar pesantren menyangkut kepentingan kehidupan dunia dan akhirat yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Tipe kiai ini tak jarang meninggalkan pesantren untuk melakukan konsolidasi dan agenda politik lainnya. Biasanya, kegiatan belajar mengajar di pesantren lebih banyak diserahkan kepada pengurus senior.

B. Partisipasi Kiai Pesantren dalam Arena Politik

Keterlibatan kiai dalam bidang politik tentunya tidak lepas dari paradigma relasi agama dan negara yang berhubungan secara simbiotik, di mana keduanya terjalin hubungan timbal balik atau saling memerlukan. Dalam konteks ini agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara agama dapat hidup dengan aman dalam wilayah Negara dan dengan leluasa diamankan oleh para pengikutnya. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun kehidupan bernegara. Pemikiran demikian mendorong kiai untuk terlibat, secara langsung ataupun tidak langsung, dalam partisipasi politik (Althoff, 2003).

Partisipasi politik kiai yang mengarah kepada suatu afiliasi politik tertentu dalam prakteknya lebih disebabkan karena adanya ikatan solidaritas sebagai sesama anggota organisasi sosial keagamaan yang sama. Gejala seperti ini dapat dilihat pada waktu pelaksanaan pemilihan Bupati Tuban (Pilkada 2011). Dari lima calon Bupati yang terbanyak mendapat dukungan dari pemilih di daerah

Tuban adalah Fathul Huda (Ketua Nahdlatul Ulama cabang Tuban, dan Pembina Thoriqoh Syadzilyah wilayah Tuban) berpasangan dengan M. Noor Nahar (juga pengurus NU cabang Tuban) dengan perolehan suara mutlak 56.160 % suara.

Dukungan kiai kepada calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dilakukan dengan berbagai macam bentuk, seperti do'a bersama (istighosah), pengajian umum, pengajian khususiyah tarekat, bahkan beberapa kiai memanfaatkan khutbah jum'at untuk mengarahkan dukungan kepada calon bupati tertentu. Pola hubungan balas budi dan adanya harapan tertentu dari calon yang didukungnya juga merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi keterlibatan kiai dalam proses pilkada. Dalam konteks ini, posisi kiai cukup kuat karena kiai dapat memobilisasi massa jama'ahnya melalui kegiatan keagamaan bersama. Aktivitas keagamaan ini secara efektif dapat mempengaruhi massa pemilih karena melalui jaringan santri dan jama'ahnya kiai dapat melakukan mobilisasi massa untuk mendukung bahkan memilih calon tertentu.

Selain pertimbangan kehidupan keagamaan, dukungan seorang kiai kepada calon Bupati lebih dikarenakan adanya ikatan ideologi organisasi yang sama antara kiai dengan calon tersebut. Misalnya, seorang kiai NU akan lebih mendukung calon dari NU; sementara yang lain juga akan mendukung calon dari komunitasnya sendiri.

C. Tipologi Budaya Politik Kiai

Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan, simbol-simbol, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi situasi di mana suatu peristiwa politik terjadi. Chilcote membedakan budaya politik kedalam tiga tipe, yaitu *pertama*, tipe parokial (apatis) yang mengisyaratkan bahwa individu-individu memiliki pengharapan dan kepedulian yang rendah terhadap pemerintah dan umumnya tidak merasa terlibat bahkan seringkali bersifat apatis. *Kedua*, tipe subyek, di mana individu-individu peduli dengan hasil-hasil yang dicapai pemerintah namun tidak berpartisipasi dalam proses-proses yang menghasilkan keputusan-keputusan kebijakan tertentu, dengan kata lain subyek merupakan penonton. *Ketiga*, partisipan, di mana inividu-individu bersikap aktif dan terlibat dengan sistem secara utuh, yaitu dalam proses-proses input maupun outputnya (Fadhilah, 2007). Mengacu pada pemikiran di atas, budaya politik kiai di kabupaten Tuban berdasarkan bentuk dan orientasi aktivitas politiknya dapat dibedakan menjadi tiga kategori tersebut.

Pertama, budaya politik kiai parokial (apatis), yaitu tipe kiai pesantren yang menutup diri terhadap aktivitas politik dan menjauhkan diri serta tidak mau memasuki sistem politik yang berlaku di masyarakat. *Kedua*, budaya politik kiai subyek (partisipasi pasif), yaitu kiai pesantren yang tidak menutup diri terhadap aktivitas politik, akan tetapi tidak berpartisipasi secara aktif. *Ketiga*, budaya politik kiai partisipan, yaitu kiai yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik.

3. SIMPULAN

Tradisi kepemimpinan kiai pesantren yang paternalistik di pesantren tetap bertahan karena disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Secara internal, atau faktor yang berasal dari diri kiai yang bersangkutan, kiai memandang santri merupakan amanat yang diberikan kepada kiai sebagai anak didiknya sehingga harus diperlakukan dengan baik sebagaimana anaknya sendiri. Sedangkan faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri kiai pesantren, antara lain, *pertama*, tradisi perekrutan santri yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan; *kedua*, santri memandang kiai pesantren sebagaimana orang tuanya sendiri, dan *ketiga*, doktrin kitab Ta'lim Muta'allim yang mengajarkan tentang etika penghormatan santri kepada kainya.

Dampak positif kepemimpinan paternalistik dalam kehidupan pesantren adalah adanya hubungan yang erat antara pemimpin (kiai) dengan yang dipimpin (santri), di mana kiai sebagai pemimpin di pesantren akan selalu memperhatikan pengikutnya sehingga ikatan sebagai keluarga besar pesantren tetap terpelihara. Sedangkan kelemahan dari pola kepemimpinan paternalistik adalah munculnya ketergantungan yang ada di lingkungannya. Hal ini melahirkan tipologi kiai advokatif yang memiliki peran mengontrol secara langsung masyarakat sekitarnya.

Selanjutnya, budaya politik kiai di Kabupaten Tuban berdasarkan bentuk dan orientasi aktivitas politiknya dapat dibedakan menjadi tiga kategori: *pertama*, tipe budaya politik kiai parokial (apatis). *Kedua*, budaya politik kiai subyek (partisipasi pasif), dan *ketiga*, budaya politik kiai partisipan, yaitu kiai yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Ketiga tipologi tersebut dipengaruhi oleh dinamika fokus kegiatan organisasi sosial keagamaan kiai yang bersangkutan serta tindakan adaptasi dengan iklim politik di masyarakat. Dengan kata lain tipologi budaya politik kiai tidak bersifat statis akan tetapi dinamis menyesuaikan dengan kondisi sosial politik yang ada di masyarakat.

REFERENSI

- Althoff, R. M. dan P. (2003). *Sosiologi Politik*. Raja Grafindo Persada.
- Az-Zarnuji. (2019). Ta'Limul Muta'Allim. In *Ta'Limul Muta'Allim*. Maktabah Al-Islami.
- Beny, D. (2003). *The Principles of Sociology* (P. Wintom (penerj.)). Raja Grafindo Persada.
- Chilcote, R. H. (2003). *Theories of Comperatifoe Politics The Search for a Freedom* (H. Munandar (penerj.)). Raja Grafindo Persada.
- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. LP3S.
- Dirdjosanjoto, P. (1999). *Memelihara umat kiai pesantren-kiai langgar di Jawa*. LKiS.
- Fadhilah, A. (2007). Budaya Politik kiai Di Pedesaan. *Alqalam*, 24(1), 37. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v24i1.1655>
- Humaeni, A. (2016). RITUAL, KEPERCAYAAN LOKAL DAN IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT CIOMAS BANTEN. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 17(2), 157. <https://doi.org/10.18860/el.v17i2.3343>
- Kurasawa. (1993). *Mobilitas dan Kontrol Sosial : Studi Tentang Perubahan Sosial diPedaerahan Jawa 1942-1945* (H. Sulistyoyo (penerj.)). Gramedia.
- Mannheim, K. (1987). *Systematic Sociology* (Alimandan (penerj.)). Penerbit Bina Aksara.
- Maryanski, J. H. T. dan A. (1998). Network Analysis. In *The Structure of Sociological Theory*. Wadsworth Publishing Company.
- Meyer, P. M. B. & M. W. (1987). *Birokrasi dalam Masyarakat*. UI Press.
- Muary, R., & Nurwahyu, A. (2024). Tuan Guru Batak: A Phenomenon of Religion, Culture and Practical Politics. *Malikussaleh Social & Political Reviews*, 5(1), 7–14.
- Mutiullah, M. Y. N. (2024). Religion and Politics in Indonesia: The Role of kiai in the 2024 Election, Case Study on Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v20i1.18527>
- Muzadi, H. (1999). *Nahdhatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*. Logos Wacana Ilmu.
- Pislawati Alfiaturrahman. (2016). Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Valuta*, 2(2), 251–267.
- Polak, J. B. A. F. M. (1979). *Sosiologi: Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Ehtiar Barru.
- Ridlo, U. (2023). Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik. In *Uinjkt.Ac.Id*. <https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/08/30/metode-penelitian-studi-kasus->

case-study/

Tafsir, A. (1991). Tarekat dan Hubungannya dengan Tasawuf. In H. Nasution (Ed.), *Thoriqot Qadiriyyah Naqsyabandiyah: Sejarah, Asal-usul dan Perkembangannya*. IAIIM.

Usman, S. (1991). Struktur Interaksi Kelompok Elit dalam Pembangunan: Penelitian di Tiga Desa Santri. *Prisma*, No 6, Juni.

This page is intentionally left blank